

# BAB I

## PENDAHULUAN

Cina dan Jepang. Dua raksasa di Asia yang dalam puluhan tahun terakhir mengalami pasang surut hubungan sehingga membuat was-was banyak negara tetangga mereka. Kekhawatiran tersebut bisa dimaklumi mengingat rivalitas kedua negara itu makin tinggi seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina. Jika di masa lalu Jepang hanya merasa 'terancam' oleh ideologi yang tidak bersahabat dari Cina, Negeri Matahari Terbit itu kini kian khawatir dengan pembangunan militer serta kemajuan ekonomi Cina.<sup>1</sup> Kemerosotan hubungan Cina-Jepang dipicu banyak hal, salah satunya adalah persoalan sejarah masa lalu antara keduanya. Peluncuran buku pelajaran sejarah oleh Jepang telah banyak membuat warga Cina marah. Buku yang selalu mengundang kontroversi ini sebenarnya tidak hanya membuat warga Cina geram, namun karena peluncuran buku ini pula telah mampu membuat hubungan diplomatik keduanya memanas. Di sini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Dinamika Hubungan Bilateral Jepang-Cina" (Studi kasus Peluncuran buku Pelajaran Sejarah Jepang).

### A. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa Jepang tidak melakukan revisi dan tetap meluncurkan buku sejarah yang kontroversial tersebut.
2. Untuk membuktikan kebenaran hipotesa dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>1</sup> *Investor Daily*, 29 Desember 2005.

## B. Latar Belakang Masalah

Kehidupan internasional merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi antara unit-unit politik (negara) yang saling mempengaruhi. Hubungan-hubungan tersebut lazim di sebut sebagai hubungan internasional. Hubungan internasional dapat diartikan sebagai interaksi dari aktor-aktor di mana tindakan dari para aktor tersebut membawa pengaruh terhadap aktor lainnya di luar batas yurisdiksinya. Interaksi di sini dimaksudkan sebagai adanya timbal balik di mana minimal ada dua pihak yang berinteraksi maka baru dapat di sebut harmonis; dominan; dependen; atau bersifat konflik.

Interaksi dari para aktor memasuki awal abad ke 20 ini di tandai dengan hubungan dalam region atau kawasan yang merupakan suatu perubahan dalam sistem internasional. Masalah-masalah regional mulai berkembang dan mewarnai sistem internasional yang ada. Salah satu kawasan sebagai *hot tension* atau daerah yang tingkat konfliknya sangat tinggi selain kawasan Timur Tengah adalah kawasan asia timur, tersebut disini adalah krisis hubungan diplomatik yang terjadi antara negara Cina dengan negara Jepang.

Kawasan Asia Timur yang terdiri dari berbagai negara seperti Cina, Jepang, korea, dan Mongolia tidak hanya terkenal dengan pertumbuhan ekonominya yang kuat, namun juga negara-negara tersebut tidak luput dari berkembangnya isu-isu tentang persaingan pengaruh di kawasan Asia timur. Krisis yang terjadi antara Cina-Jepang ini sendiri bermula dari buku sejarah yang diterbitkan oleh Jepang pada awal April 2005 lalu. Hubungan keduanya memang kerap memanas, terlebih jika dikaitkan dengan sejarah pada masa lalu. Tidak seperti biasanya, musim semi di Cina

sepanjang bulan April 2005 dimeriahkan dengan unjuk rasa bernuansa kekerasan. Aksi ini meruyak dari Beijing sampai ke Guangzhou, Senzhen, bahkan mencapai Hongkong, Puluhan ribu warga turun ke jalan, merusak barang-barang produk Jepang, termasuk mobil bahkan membakar bendera “matahari terbit”. Sejumlah toko milik Jepang tidak luput dari sasaran. Para demonstran juga melempari Kedutaan Besar Jepang di Beijing dan memecahkan kaca-kaca jendelanya.

Aksi anti-Jepang yang meletus di berbagai kota di Cina ini memang dipicu oleh diterbitkannya buku pelajaran sejarah oleh Jepang, yang isinya banyak disebut oleh Cina merupakan hanya memutar balikkan fakta sejarah. Isi buku sejarah baru yang diajarkan di sekolah-sekolah Jepang itu telah menuai kritik dari Cina, karena buku sejarah tersebut sama sekali tidak berkualitas, masalahnya, buku itu dianggap sebagai upaya Jepang menghapus kekejaman tentara Jepang pada masa Perang Dunia II, antara lain di dalam buku tersebut dituliskan bahwa “Tragedi Nanjing”, yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di Cina, 1937, disebut sebagai insiden belaka. Membaca “versi” ini, rakyat Cina naik pitam. Mereka menuding Jepang sengaja membengkokkan sejarah, sekaligus menutupi kebengisan tentaranya di masa lalu. Bagi Cina, tragedi di Nanjing biasa disebut “The Rape of Nanjing” merupakan “monumen” kebrutalan Jepang di masa lampau.<sup>2</sup> Rakyat Cina yakin, tewasnya 300 ribu orang Cina dan anak-anak dalam peristiwa itu merupakan buah skenario serdadu Jepang. Dalam buku itu juga tidak disebutkan mengenai praktik yang dilakukan Jepang yang mengambil ratusan ribu wanita Asia dan Barat untuk perbudakan seksual bagi pasukan kekaisaran dan menutupi invasi-invasi yang dilakukannya. Hal ini merugikan bagi Cina dan Korea pada umumnya, dimana Korea juga merupakan salah

satu negara Asia Tenggara yang pernah mengalami penjajahan serta pendudukan tentara Dai Nipon.

Masih mengenai isi buku sejarah Jepang, di dalamnya Jepang dicitrakan sebagai sebuah bangsa yang baik-baik, bukan sebuah bangsa penjajah yang tidak beradab. Di buku itu sama sekali tidak terdapat kata-kata “invasi” atau menjajah ketika negara matahari terbit itu menduduki beberapa wilayah di Asia pada awal Perang Dunia II. Buku itu juga tidak menceritakan bagaimana kekejaman tentara Jepang di wilayah pendudukan, seperti romusha, kerja rodi atau kerja paksa. Oleh karena penerbitan buku sejarah kontroversial ini, aksi unjuk rasa anti-Jepang tidak dapat dibendung lagi dan merebak di sebagian besar kota di Cina. Selain warga Cina memboikot barang-barang produksi Jepang, warga juga melakukan aksi demonstrasi guna memprotes Jepang yang berambisi dipilih menjadi anggota tetap di Dewan Keamanan PBB. Satu hari setelah aksi pelemparan Kedutaan Besar Jepang di Beijing, 10 April 2005, di provinsi Guang dong, aksi unjuk rasa juga terjadi di dua kota dan diikuti juga oleh sekitar 20.000 warga. Sebuah toko serba ada Jepang di Shenzhen, salah satu kota di provinsi di Cina bagian selatan, menjadi sasaran serangan para pengunjuk rasa.

Protes terhadap penulisan sejarah oleh Jepang ini sebenarnya sudah dimulai empat tahun lalu, tepatnya pada tahun 2001, Cina sudah melayangkan protes dan menuntut revisi buku yang sama. Protes itu berlalu begitu saja. Kini masalahnya berkembang dan melebar kemana-mana, sampai pada mempersoalkan posisi Jepang sebagai kandidat anggota tetap Dewan keamanan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ganti rugi dari masa perang juga diungkit- unkit, beserta perebutan wilayah di timur

---

<sup>2</sup> *Tempo*, 24 April, 2005

laut Cina, yang kaya sumber mineral dan energi.<sup>3</sup> Kemarahan kemudian semakin memuncak tidak hanya karena diterbitkannya buku sejarah oleh kelompok sayap kanan Jepang saja, namun diperparah dengan kunjungan PM Jepang, Junichiro Koizumi ke kuil Yasukuni pada 25 Mei 2005. Bagi Cina, kunjungan ke kuil Yasukuni sama halnya dengan menghormati arwah para penjahat perang yang pernah menyengsarakannya.

Memang menjadi sebuah dilema yang sulit apabila suatu pengajuan minta maaf telah dilakukan, namun kesalahan yang sama kembali terulang di kemudian hari. Hal ini sama persis yang terjadi dalam hubungan diplomatik antara Jepang dengan Cina. Pada tanggal 15 Agustus 1995 lalu, tepatnya saat peringatan Perang Dunia II ke-50, Perdana menteri Jepang waktu itu Tomiichi Murayama melalui majelis rendah ia menyatakan sikap untuk memohon maaf atas masa lalu Jepang yang menjalani kepemimpinan kolonial dan agresi yang menyebabkan kerusakan hebat dan penderitaan bagi rakyat banyak negara, khususnya negara-negara Asia. Teks resolusi oleh Majelis Rendah berbunyi itu sebagai berikut :

On the occasion of the fiftieth anniversary of the end of the World War II, this house offers its sincere condolences to those who fell in action and victims of wars and similar actions all over the world.

Solemnly reflecting upon many instances of colonial rule and aggressive acts in the modern history of the world, and recognizing that Japan carried out such acts in the past, inflicting pain and suffering upon the people of other countries, especially in Asia, the members of this house express a sense of deep remorse.

We must transcend the differences over historical views of the past war and learn humbly the lessons of history so as to build a peaceful international society.

---

<sup>3</sup> *Loc cit*

This house expresses its resolve, under the banner of eternal peace enshired in the Constitution of Japan, to joint hands with other nations of the world and to pave the way to a future that allows all human beings to live together.<sup>4</sup>

Resolusi yang bertema komitmen Jepang untuk belajar dari sejarah masa lalu dan berkemauan keras untuk menjaga perdamaian ini, didukung dari partai Demokrasi Liberal (LDP), partai Sosial Demokratik dan partai Sakigake Baru. Namun resolusi ini juga tidak luput dari aksi protes yang dilayangkan dari pihak oposisi, Shinsito (*New Frontier Party*) menganggap bahwa statmen atau pernyataan resolusi itu terkesan jauh dari ungkapan penyesalan dan bermakna ambigu dikarenakan terdapat perbedaan pandangan mengenai sejarah perang di masa lalu. Seluruh anggota oposisi waktu itu abstain alias tidak hadir saat penghitungan suara berlangsung. Aksi ini merupakan hal yang tidak biasa terjadi selama resolusi Diet pernah diadakan.

Pernyataan resmi Jepang menyesal kepada publik atas agresinya di masa lalu, tidak demikian halnya dengan cetakan buku sejarah yang diterbitkan. Buku pelajaran sejarah Jepang nampaknya dari dulu sudah selalu mengundang kontroversi, mulai dari penggantian penggunaan kata "invasi" sampai dengan penggambaran tragedi Nanjing yang menuai protes, baik dari pihak Cina, Asia bagian selatan maupun warga Korea. Kontroversi lain adalah, ketika proses pemeriksaan buku sejarah untuk sekolah tingkat menengah ke atas sebelum mendapat izin, ternyata dari pihak menteri pendidikan telah mengutus kepada editor buku supaya sebelum buku tersebut di cetak, sang editor harus menulis ulang atau mengganti kata "agresi" yang dilakukan Jepang dengan kata

---

<sup>4</sup> Wakamiya Yoshibumi, *The Postwar Conservative View Of Asia*, LTBC International Library Foundation, 1998, page 9.

“advance” dan aksi “the March 1<sup>st</sup> independence movement” atau Gerakan Kemerdekaan 1 Maret di Korea di ganti dengan “rioting” atau hanya sebuah kerusuhan belaka. Kontan hal ini memicu kemarahan dari Cina dan Korea.<sup>5</sup>

Kemudian saat pembukaan konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika bulan April 2005 di Jakarta, Perdana menteri Jepang, Junichiro Koizumi mengungkapkan “penyesalan yang dalam” atas agresi dalam Perang Dunia II silam. Pidato yang berisi penyesalan yang dalam dan yang selalu tertanam di ingatan, Jepang akhirnya telah bertahan dengan konsisten sejak Perang Dunia II, tidak pernah kembali lagi pada kekuatan militer namun pada kekuatan ekonomi, prinsip-prinsipnya untuk menyelesaikan seluruh masalah dengan cara yang damai, tanpa mencoba menggunakan kekuasaan, ini disampaikan di hadapan hadirin yang terdiri dari para pemimpin negara, termasuk Presiden Hu dan negara-negara lain yang juga sempat menderita karena pernah dijajah Jepang. Pernyataan ini juga disiarkan di seluruh dunia dan dihadiri 50 pemimpin negara lain.

Pidato ini sebenarnya tidak ayal menyusul terjadinya ketegangan hubungan antara Jepang dengan Cina terkait diluncurkannya buku sejarah yang berjudul *A common Book on History of East Asian Countries*. Cina memprotes isi buku ini karena isinya yang dianggap mengecilkan arti kekejaman Jepang terhadap sejumlah negara Asia, termasuk cina sendiri.

Kata-kata maaf ini tampaknya mirip dengan pernyataan Tomiichi Murayama yang telah disampaikan pada tahun 1995. Namun dari kalangan yang skeptis memandang, permintaan maaf lisan itu tidak cukup untuk mengobati rasa sakit hati. Jepang dituntut untuk meminta maaf lebih dari sekedar kata-kata. Rakyat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, page 197.

Cina menunggu bukti konkrit dari penyesalan itu. Sehubungan dengan memburuknya hubungan keduanya, di Cina pun opini dan komentar melalui surat elektronik marak. Lebih dari 1.000 pengguna internet di Cina menyampaikan komentar. "Tindakan nyata jauh lebih penting, mereka (Jepang) harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa permintaan maaf tersebut tulus", demikian salah satu isi tulisan surat yang masuk. Hingga kini, rakyat Cina juga belum melihat bahwa permintaan maaf tersebut disampaikan secara tulus. Apalagi saat yang sama, beberapa anggota parlemen Jepang berziarah ke Kuil Yasukuni, yang menjadi kompleks pemakaman tentara Jepang yang tewas dalam Perang Dunia II.<sup>6</sup> Nampak kesan seperti Jepang telah tidak konsisten terhadap ungkapan permintaan maaf kepada Cina, terbukti dengan Jepang meloloskan buku sejarah yang mengorek kembali luka lama warga Cina pada khususnya dan warga Asia lain pada umumnya.

Gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung di Cina ini diperkirakan merupakan aksi untuk rasa anti -Jepang terbesar yang pernah terjadi di Cina sejak kedua negara menormalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1972. Ini juga merupakan aksi protes terbesar di negeri tirai bambu itu sejak peristiwa perusakan gedung Kedutaan Besar Cina di Beograd oleh Amerika Serikat (AS) pada tahun 1999 dalam masa konflik Kosovo.

Akibat dari peluncuran buku sejarah ini, di Cina terjadi aksi anti-Jepang. Hubungan keduanya semakin memanas. Yang terjadi kemudian adalah gejolak saling membenarkan argumen masing-masing. Kelompok sayap kanan Jepang mengatakan bahwa membangkitkan semangat nasionalisme adalah suatu hal penting dan perlu dilakukan oleh Jepang. Namun di sisi lain, Cina melakukan aksi protes ini

---

<sup>6</sup> *Forum Keadilan*, 1 Mei 2005



juga didasari rasa kebersatuan mereka yang tidak kalah besar dengan Jepang dan merupakan wujud warga Cina yang tidak menginginkan fakta sejarah dilecehkan oleh Jepang.

### **C. Pokok Permasalahan**

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil suatu pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

Mengapa Jepang tidak memenuhi tuntutan Cina yang menginginkan dilakukannya revisi dalam buku sejarah tersebut?

### **D. Kerangka Dasar Berfikir/ Teori**

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu bisa terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Penggunaan teori selain untuk melakukan eksplanasi juga menjadi dasar bagi prediksi. Selain itu juga digunakan konsep untuk mengorganisasi dan mengidentifikasi fenomena yang menarik perhatian. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep ini secara logis saling berhubungan.

Berangkat dari uraian diatas, kerangka dasar teoritik yang akan dipergunakan dalam permasalahan ini adalah Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making Theory) dari Graham T. Allison dan Konsep Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton. Teori atau model ini mendasarkan pada gagasan adanya rasionalitas komprehensif dari perilaku ideal, artinya mencari pilihan

alternatif yang paling ideal. Dengan kata lain dalam memutuskan suatu kebijakan yang paling optimum dalam artian dalam pada hubungan sarana dan tujuannya.<sup>7</sup>

### 1. Teori Pengambilan Keputusan

Graham T. Allison mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ketiga model tersebut adalah model aktor rasional, model proses organisasi, dan model politik birokratik. Pada penulisan skripsi ini dipergunakan Model III, Politik-Birokratik sebagai kerangka untuk mendeskripsikan kebijakan yang ditempuh Jepang dalam menentukan sikapnya terhadap gagasan peluncuran buku sejarah.

Pada model I, yaitu Aktor Rasional, dipandang sebagai akibat tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Proses pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang berakar dan terkoordinasi. Dalam model ini digambarkan bahwa pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksananya. Dalam model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri.

Pada model II, yaitu Model Proses Organisasi, dalam model ini digambarkan politik luar negeri dipandang sebagai hasil kerja suatu

---

<sup>7</sup> Mohtar Mas' oed, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, PAU-UGM, 1998, hal.216.

organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan bukan semata-mata sebagai suatu proses intelektual, namun lebih merupakan proses *mekanis* yaitu, pembuatan keputusan dilakukan dengan secara mekanik merujuk pada keputusan-keputusan di masa lalu, pada preseden, prosedur rutin yang berlalu, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu. Pola ini disebut perilaku prosedur kerja baku (*standard operating procedur*)<sup>8</sup>.

Dalam model ini digambarkan bahwa semua organisasi pemerintahan memiliki catatan tentang perilakunya di masa lalu yang selalu bisa ditengok dan diulang kembali. Organisasi itu pada dasarnya juga bersifat konservatif dan jarang yang mau mencoba-coba sesuatu yang baru, umumnya cukup senang dengan perubahan-perubahan kecil dan inkremental saja terhadap keputusan dan perilakunya di masa lalu. Salah satu cara mengurangi kompleksitas dan ketidakpastian masalah yang dihadapi adalah dengan melakukan tindakan seperti tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Organisasi juga cenderung memiliki pedoman, buku petunjuk, atau semacam itu yang berisi cara bagaimana organisasi seharusnya menyelesaikan persoalan. Allison juga menjelaskan Model Proses Organisasi ini, membahas apa yang akan terjadi pada suatu waktu bisa diramalkan dengan melihat apa yang telah terjadi pada waktu sebelumnya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya model ini mengajukan tiga proposisi. *Pertama*, suatu pemerintahan terdiri dari sekumpulan organisasi-organisasi yang secara

---

<sup>8</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan internasional : Disiplin dan Metologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 235.

<sup>9</sup> *Ibid.*

longgar bersekutu dalam struktur hubungan yang mirip struktur hubungan feodal. *Kedua*, keputusan dan perilaku pemerintah bukanlah hasil dari proses penetapan pilihan secara rasional, tetapi sebagai out put atau hasil kerja organisasi-organisasi besar yang bekerja menurut pola perilaku baku. *Ketiga*, setiap organisasi, yang memiliki prosedur kerja baku dan program, serta bekerja secara rutin, umumnya akan berperilaku sama seperti perilaku di masa sebelumnya. Proses *semi-mekanis* ini mempengaruhi keputusan yang dibuat maupun penerapan keputusan itu.<sup>10</sup>

Model yang ke III yaitu Politik-Birokratik. Dalam model ini politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil proses dari intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. Politik luar negeri adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi. Ini melibatkan berbagai tawar menawar (*bargaining games*) di antara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri adalah *proses social*, bukan proses intelektual. Di sini digambarkan suatu proses di mana masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional. Setiap pemain seperti presiden, para menteri, penasehat, jenderal, anggota parlemen, dan lain-lainnya, berusaha menetapkan tujuan, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan melalui suatu proses intelektual.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sangat relevan jika Jepang dalam hal ini memakai model politik-birokratik. Studi perilaku politik luar negeri menurut model ini bukanlah perilaku suatu aktor yang monolit, yaitu

---

<sup>10</sup> Mohtar Mas' oed, *Op. cit*, hal. 236.

aktor yang memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya dan melakukan tindakan untuk mencapainya. Namun di sini ditekankan *bargaining games* sebagai penentu perilaku politik luar negeri, dalam mempelajari proses pembuatan keputusan luar negeri kita harus memperoleh informasi tentang persepsi, motivasi, posisi, kekuasaan, dan manuver dari pemain-pemain yang terlibat di dalamnya.<sup>11</sup> Peluncuran buku pelajaran sejarah Jepang ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Jepang yang dimotori oleh kementerian Kebudayaan dan Ilmu pengetahuan Jepang dengan kelompok sayap kanan Jepang, yang sebagian besar adalah kalangan intelektual akademisi nasionalis yang merasa sangat prihatin terhadap kondisi pengajaran sejarah di Jepang. Menurut Nobukatstu Fujioka, wakil organisasi Masyarakat untuk Reformasi Buku pelajaran Sejarah Jepang, menjelaskan, sampai saat ini Jepang mengajarkan anak-anaknya sejarah yang sangat dipengaruhi oleh propaganda musuh zaman perang yang belum terbukti kebenarannya.<sup>12</sup> Dapat dibayangkan bagaimana anak-anak Jepang menjadi yakin bahwa nenek moyang mereka adalah para monster yang haus darah. Padahal kenyataannya tidak ada bukti-bukti bahwa para penjahat perang Jepang lebih buruk dari penjahat perang yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Bayangan buruk mengenai generasi penerus Jepang yang akan menjadi benci sendiri dengan kisah masa lalu tentaranya yang telah menoreh penderitaan bagi bangsa lain inilah yang merupakan penyebab tetap diluncurkannya buku sejarah tersebut tanpa dilakukannya revisi terlebih dahulu.

---

<sup>11</sup> Mohtar Mas' oed, *Op.cit*, hal 237

<sup>12</sup> *Kompas*, 1 Mei, 2005.

Dalam hal ini penulis juga ingin menyinggung mengenai kepentingan nasional Jepang, terkait keinginannya untuk tetap menanamkan jiwa nasionalismenya terhadap anak-anak sekolah dengan tetap meluncurkan buku sejarah, ini juga merupakan proses dari perwujudan kepentingan nasional itu sendiri.

## 2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional, menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah Politik Luar Negeri Sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional bertujuan mencapai kepentingan nasional.

*(Foreign Policy as a strategy or planned course of action developed by decision makers of a state vis a vis other or international entities aimed at achieving specific goals in term of national interest)<sup>13</sup>*

Setiap negara yang berinteraksi dengan negara lain menggunakan politik luar negeri sebagai sarana interaksi dan komunikasi senantiasa berlandaskan kepentingan nasional masing-masing. Artinya, politik luar negeri merupakan politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki.<sup>14</sup>

Untuk mencapai tujuan nasional luar negeri, perlu dipertimbangkan juga kekuatan nasional yang dimiliki. Adapun elemen-

---

<sup>13</sup> Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Holt, Rineheart&Winston, USA, 1967, hal 127

<sup>14</sup> Sufri Yusuf, *Hubungan internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 10.

elemen dari kepentingan nasional, menurut Roy Olton dan Jack C. Plano, mencakup kelangsungan hidup (*self preservation*), kemandirian (*independence*), integritas territorial (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).<sup>15</sup>

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional bersumber dari seluruh sistem nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap negara dalam melaksanakan politik luar negeri, di mana ia tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan - pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu negara.<sup>16</sup>

Sebagaimana kita ketahui, saat ini ekonomi Jepang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian global. Dengan kemajuan yang telah dapat dicapainya mulai awal tahun 1980-an hingga sekarang, Jepang telah menunjukkan dominasinya di Asia melalui aspek ekonominya. Dengan pendapatan perkapitanya yang cukup tinggi, Jepang menjadi barometer ekonomi dunia. Hal ini pula yang turut menjadikan Jepang mampu berkiprah dalam fora internasional.

Adapun keputusan Jepang untuk tetap meluncurkan buku sejarah itu juga merupakan salah satu kepentingan nasional yang termasuk dalam elemen kemandirian atau *independence* melalui peluncuran buku pelajaran

---

<sup>15</sup> *Opcit*, hal. 217.

<sup>16</sup> Dahlan Nasution, *Konsep Politik Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1983. hal. 32.

sejarah guna membangkitkan semangat nasionalisme kepada warganya. Krisis antara Cina-Jepang ini sendiri sebenarnya tidak hanya ditimbulkan oleh permasalahan buku sejarah saja, namun juga adanya perlawanan pihak Cina terhadap keinginan Jepang yang ingin menjadi anggota tetap di DK PBB. Jepang merasa yakin akan mendapatkan kursi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, keyakinannya ini didasarkan pada peran dan kontribusi Jepang yang besar kepada badan dunia itu. Wakil Duta Besar Jepang di Indonesia, Masafumi Kuroki menegaskan, Jepang layak mendapatkan kursi tetap DK karena partisipasi yang telah diberikan Jepang kepada PBB dan masyarakat Internasional. Jepang sendiri jelasnya, adalah penyumbang terbesar kedua di PBB setelah Amerika Serikat (AS). Sumbangan finansial Jepang bahkan jauh lebih besar dari total sumbangan keempat negara tetap DK PBB lainnya, yaitu Cina, Inggris, Prancis, dan Rusia.<sup>17</sup> Tahun lalu misalnya Jepang menyumbang dana sebesar 19,5 persen dari 1,2 miliar dolar AS anggaran rutin yang dibutuhkan PBB. Jumlah ini belum termasuk ratusan juta dolar yang dikururkan Jepang untuk membiayai pasukan PBB, pengadilan PBB, dan organisasi PBB lainnya.<sup>18</sup> Besarnya anggaran yang dikururkan Jepang ini juga merupakan salah satu alasan yang membuat Jepang merasa layak menjadi anggota di DK PBB. Menlu Amerika Serikat (AS), Condoleezza Rice pun juga menegaskan bahwa AS tetap mendukung keinginan Jepang untuk bergabung dan memperluas anggota tetap DK PBB.

---

<sup>17</sup> *Republika*, 30 Maret, 2005.

<sup>18</sup> *Ibid*, 29 Juli, 2005.



Terlepas dari berbagai macam polemik yang terjadi, mulai dari pertentangan Cina yang tidak menginginkan Jepang menjadi anggota tetap di DK PBB, sampai dengan peluncuran buku sejarah yang diterbitkan oleh perusahaan Fuso ini sebenarnya merupakan cerminan sikap kemandirian yang diambil oleh Jepang. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya kritik terhadap buku sejarah ini juga ada yang berasal dari kalangan masyarakat Jepang sendiri.

### 3. Teori Persepsi

Persepsi sangat mempengaruhi perilaku suatu Negara, selain juga berkaitan dengan image atau citra. Persepsi selain mengandung nilai-nilai keyakinan yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya juga mengandung keyakinan tentang suatu hal yang dianggap benar, meskipun kebenaran tersebut diragukan kebenarannya.

*“decision makers, like all other human beings, are seubjectto many psychological process that effect perception defence mechanism, reduction of anxiety, rationalization, displacement and repression and many others psychological process and characteristics that make up our individual personalities”<sup>19</sup>*

Menurut Franck, “cara “dua Negara saling “melihat” satu sama lain sering menentukan cara mereka berinteraksi. Suatu pola kerjasama yang

---

<sup>19</sup> Bruce Russet dan Harvey Star, *World Politics The Menu for Choice*, Freeman Co., New York, 1985, hal 304-305.

sistematik tidak mungkin berkembang di antara Negara-negara yang masing-masing menganggap lawan sebagai jahat, agresif dan tak bermoral<sup>20</sup>

Dalam kasus peluncuran buku sejarah ini, pada awalnya pemerintah China serta warganya menerima informasi dari lingkungan sekitar berupa kabar dari Jepang bahwa mereka telah meloloskan buku pelajaran sejarah, dimana isinya menurut pihak Cina sangat diluar cerita yang sebenarnya. Pemerintah Cina mempersepsikan peluncuran buku sejarah tersebut melalui kaca mata mereka. Sebelumnya Cina telah melakukan hal protes atas buku tersebut dan Cina mendapatkan gambaran tentang pemerintah Jepang yang hanya selalu "manis di bibir" saja, yaitu hanya dengan menyatakan permintamaafan terhadap public. Pada masa lalu maupun sekarang hubungan Cina dengan Jepang selalu diwarnai dinamika yang kompleks, mulai dari perebutan wilayah di Taiwan hingga merembet ke permasalahan eksplorasi gas di perairan Laut Cina Timur.

Nampaknya Jepang juga harus bersikap lebih hati-hati lagi karena Jepang sendiri sebenarnya mengakui adanya perbedaan pandangan antara Jepang dan Korea Selatan serta Cina berkenaan dengan sejarah. Kritikan mengalir tidak hanya datang dari Cina dan Korea belaka, sejatinya dari dalam negeri Jepang sendiripun tak pelak muncul kritikan pedas. Lihat berita Forum Keadilan no.49, 17 April 2005 hal 46-47. Perbedaan persepsi ini jugalah yang kian memanaskan suhu hubungan bilateral Cina dengan Jepang.

---

<sup>20</sup> Thomas Franck dan Edward Weisband, dikutip dari Mochtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional :Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU-UGM,1988, hal 19

## **E. Hipotesa**

Jepang tidak melakukan revisi terhadap buku pelajaran sejarah karena Jepang tetap ingin mempertahankan jiwa semangat nasionalisme yang sudah ada.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Agar permasalahan tidak meluas dan memudahkan dalam pemecahan masalah maka penulis lebih memfokuskan pada masa diterbitkannya buku sejarah Jepang yang kontroversial (2001) dimana terjadi peluncuran pertama buku sejarah, dan pada tahun 2005 yaitu diluncurkannya kembali buku sejarah tersebut.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini didasarkan pada metode keperustakaan (*library reseach*), teknik ini dilakukan karena semua sumber-sumber yang digunakan sebagai kerangka acuan bersumber dari literatur yang ada di perpustakaan. Literatur tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, internet dan sumber-sumber yang relevan lainnya.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Merupakan pendahuluan, memaparkan mengenai latar belakang masalah dan permasalahannya. Permasalahan yang diangkat adalah mengapa Jepang tidak memenuhi tuntutan revisi buku sejarah yang diajukan oleh Cina, yang mengakibatkan hubungan keduanya memanas. Kerangka teori yang digunakan adalah

model politik-birokratik dari Graham T Allison. Hipotesa yang diperoleh adalah bahwa Jepang tidak melakukan revisi karena Jepang tidak menginginkan generasi penerusnya tidak memiliki jiwa nasionalisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dengan jangkauan penelitian tahun 2001 dan 2005.

BAB II Bidang-bidang jalinan kerjasama Jepang-Cina

BAB III Akan membahas tentang peluncuran buku sejarah.

BAB IV Akan membahas tentang aspek kemandirian dalam keputusan peluncuran buku sejarah .

BAB V Penutup.

## **I. Kerangka Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Tujuan Penulisan
- C. Pokok Permasalahan
- D. Kerangka Dasar Pemikiran
- E. Hipotesa
- F. Jangkauan Penelitian
- G. Metode Pengumpulan Data
- H. Sistematika Penulisan
- I. Kerangka Penulisan

### **Bab II Bidang-bidang jalinan kerjasama Jepang-Cina**

- A. Cina Sebagai Partner Utama Jepang
    - A.1. Hubungan Dalam Bidang Ekonomi
    - A.2. Hubungan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
  - B. Politik Luar Negeri Jepang
  - C. Implementasi Politik Luar Negeri Jepang Terhadap Hubungan Bilateral
- Keduanya

### **Bab III Peluncuran Buku Sejarah Jepang**

- A. Pihak- pihak yang terlibat dalam peluncuran buku
  - 1. Gerakan sayap kanan Jepang
  - 2. Kementerian Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Jepang
- B. Gambaran situasi saat peluncuran buku tahun 2001 dan 2005

1. Reaksi dari Cina
2. Reaksi dari Korea

#### Bab IV. Aspek kemandirian dalam Keputusan Peluncuran Buku Pelajaran

##### Sekolah Jepang

- A. Membangkitkan Semangat Nasionalisme
  - A.1. Adanya keinginan Jepang untuk mengembangkan kebijakan luar negeri yang lebih independen
- B. Hambatan dan dukungan peluncuran buku

#### Bab V Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran